

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jambi dengan luas wilayah lk. 7.679 KM² atau 767.900 ha yang terdiri atas 24 wilayah kecamatan dan 170 desa/kelurahan dengan potensi yang berbeda antara kecamatan yang satu dengan yang lain. Perbedaan yang dimaksud meliputi perbedaan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial budaya dan lain sebagainya.

Dilihat dari letak geografis, kabupaten merangin berada pada posisi antara 102⁰ – 104⁰ bujur timur dan 2⁰ – 3⁰ lintang selatan. Menurut Topografinya sebagian besar daerah terdiri atas dataran rendah, sedangkan ke arah barat dengan topografi datar, bergelombang sampai berbukit dan bergunung. Daerah yang paling luas di Kabupaten Merangin adalah daerah dengan ketinggian 500 s/d > 1.000 m dari permukaan laut.

Sumber daya lahan di Kabupaten Merangin berdasarkan topografinya, struktur dan teksturnya terdiri atas beberapa jenis yaitu : podsolid, latosol, andosol, organosol, glei humus dan tanah kompleks. Dilihat dari agihannya, maka daerah yang terluas adalah tanah yang berasal dari jenis podsolid dan latosol. Berdasarkan ketentuan oldeman, Kabupaten Merangin termasuk klasifikasi iklim type B2.

Menurut angka perkiraan potensi lahan dan luas pemanfaatan yang dihimpun dari laporan kecamatan bahwa potensi lahan kering seluas 181.134 ha, lahan sawah 13.732 ha, dengan luas pemanfaatan lahan kering sebesar 141.075 ha

dengan luas pemanfaatan lahan sawah sebesar 10.314 ha dengan demikian potensi lahan yang belum dimanfaatkan untuk lahan kering adalah 40.059 ha dan lahan sawah yang belum dimanfaatkan sebesar 3.418 ha.

Jika kita lihat dari sisi tenaga kerja ternyata masih banyak tenaga kerja yang tidak memiliki *lifes skills* seperti yang diharapkan di era globalisasi. Dengan persaingan yang semakin kompetitif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat mendatang, sangat diperlukan kecerdasan bagi tenaga kerja dan tentunya mengharapkan peran pemerintah, dunia usaha dan/atau industri, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kompetitif di masyarakat. Untuk itulah diperlukan adanya pendidikan kecakapan hidup bagi tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas individu dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Suatu hal yang sangat dikhawatirkan bahwa tenaga kerja yang tidak terampil, suatu saat akan menjadi beban pemerintah atau stakeholder. Dengan status sosial yang disandanginya, yaitu sebagai tenaga kerja yang tidak dapat membekali diri dengan ilmu dan keterampilan (Kecakapan Hidup=*Lifes skills*), karena tak dapat menempuh jenjang pendidikan sesuai cita-citanya. Mereka adalah generasi muda penerus bangsa yang masih dalam usia produktif. Meninggalkan bangku pendidikan formal berarti harus memasuki pasar kerja sebagai sumber pencari nafkah untuk menyambung dan mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya.

Angkatan kerja yang berasal dari generasi muda di Kabupaten Merangin, banyak bekerja sebagai tenaga kerja di sektor informal seperti tukang ojek, buruh

bangunan, pelayan toko serta sektor informal lainnya yang tidak begitu membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan. Dunia usaha memang memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan kepada mereka sebagai pelayan toko, staf administrasi, dan petugas lapangan misalnya marketing produk barang dan jasa, namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja.

Pemerintah daerah menghadapi masalah tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau bekerja tidak optimal (tanpa ikatan kerja yang pasti) dan dapat dikatakan menganggur yang tentunya akan memunculkan problem sosial yang tidak diinginkan. Tenaga kerja sebagai sumber daya yang memiliki beberapa sisi yang belum dapat bermanfaat dan dimanfaatkan karena terhambat oleh beberapa kendala seperti kurangnya pendidikan/pengalaman, kurangnya kemauan, terbatasnya dana, dan sebagainya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pengangguran yang sangat tidak diinginkan. Pengertian pengangguran seperti dikemukakan oleh Putong (2010: 406-407) adalah: "Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa:

Kategori orang yang menganggur biasanya mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif di atas usia 6 – 18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD – tamat SMU).

Dengan demikian, orang yang tidak sedang mencari pekerjaan contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, Mahasiswa Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan, tidak dinamakan pengangguran. Pengangguran menurut Putong (2008: 407-408) terdiri atas tiga jenis, yaitu: (1) Pengangguran Siklis, yaitu

pengangguran yang terjadi apabila permintaan lebih rendah dari output potensial perekonomian; (2) Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*), yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan tenaga kerja; dan (3) Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidak sesuaian antara struktur angkatan kerja, berdasarkan pendidikan dan keterampilan, jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografis, informasi, dan tentu saja struktur permintan tenaga kerja.

Menurut Sudantoko dan Muliawan (2009: 40-41), pengangguran adalah mereka yang berada dalam usia angkatan kerja dan tengah mencari pekerjaan dalam tingkat upah yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa ada beberapa kondisi yang tidak ideal yang merupakan pencerminan adanya pengangguran atau keadaan yang mendekati ciri-ciri pengangguran, antara lain:

- (a) Pengangguran terbuka (*open unemployment*) yakni mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak menghasilkan apa-apa walaupun telah pernah bekerja sebelumnya;
- (b) Setengah pengangguran (*under unemployment*) terdiri dari mereka yang telah bekerja, namun waktu yang dipergunakan untuk bekerja serta hasil yang diciptakan lebih sedikit daripada yang sebenarnya mampu dilakukan. Dalam batasan pengertian ini, seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggunya termasuk dalam kategori ini. Demikian pula mereka yang tidak mencari pekerjaan namun pada saat mereka ditawari pekerjaan mau menerimanya.

(c) Setengah pengangguran yang parah (*severe underemployment*) karena hanya bekerja selama 25 jam ke bawah setiap minggunya.

(d) Orang-orang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan semula.

Dengan demikian, pengangguran yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, termasuk dalam hal ini adalah pengangguran siklikal, friksional, struktural, pengangguran terbuka (*open unemployment*), setengah pengangguran (*under unemployment*), dan setengah pengangguran yang parah (*severe underemployment*).

Berikut ini, gambaran keadaan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) atau memiliki *life skills* tetapi belum mampu memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tabel 1.1. Daftar Umur Produktif Yang Tidak Memiliki Pekerjaan (Menganggur) Di Kabupaten Merangin Tahun 2009

PENCA RI KERJA	KELOMPOK UMUR												JUMLAH	
	10-14		15-19		20-29		30-44		45-54		55 +			
	L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	L	W
Pencari kerja sampai Februari 2010	0	0	1364	983	2641	2136	712	763	0	0	0	0	4717	38
JLH	0		2347		2777		1475		0		0		8599	

Sumber: Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin 2009

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah terbesar pengangguran berada pada umur 20-29 tahun (2777 Orang) dan posisi kedua berada pada umur 15-19 tahun

(2347 Orang). Ini artinya bahwa terdapat sejumlah besar warga masyarakat Kabupaten Merangin terlantar pendidikannya atau tidak mengikuti pendidikan di perguruan tinggi atau tamat Diploma dan/atau Sarjana tetapi menganggur. Begitu juga dengan pendidikan di SMTA (SMU/MA/SMK) tergolong masih banyak yang tidak menamatkan atau tidak menduduki bangku Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA).

Kondisi tersebut merupakan salah satu contoh dari lulusan/drop out sekolah dasar, menengah dan/atau perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan hidup. Kenyataan menunjukkan bahwa semangat *interpreniurship* (jiwa Wirausaha) muda tidak dapat memperlihatkan kepiawaiannya karena tidak menamatkan pendidikan formal ataupun menamatkan pendidikan formal tetapi tidak memiliki keterampilan hidup (*lifes skills*). Kondisi lain juga masih banyak ditemui bahwa mereka yang tidak memiliki keterampilan dan tidak dapat berbuat apa-apa demi hidup dan kehidupannya dimasa datang. Masa depan bagi mereka adalah sesuatu yang kabur dan tidak berdaya karena tidak dapat berupaya.

Upaya pemberdayaan pengangguran dan penggentasan kemiskinan ternyata sudah dimulai sejak tahun 1983 yang dilakukan oleh beberapa departemen atau instansi pemerintah lainnya baik bersifat penyelamatan (*rescuer*) maupun yang bersifat pemulihan (*recovery*). Program-program tersebut seperti di antaranya program jaringan pengaman sosial (*social safety net*), Program Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Peningkatan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil

(P3T), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Prakarsa Khusus bagi Pengangguran Wanita/PKPW (Special Initiative for Woman Unemployment/SIWU), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Departemen Sosial RI, Inpres Desa Tertinggal (IDT) dari Departemen Dalam Negeri, Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes), Kredit kelompok Kepada kelompok Masyarakat (K3M), Program Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera (GEKS) dari BKKBN, Program perbaikan rumah tidak layak huni dari Departemen Kimpraswil, Program bantuan pendidikan bagi anak miskin, Program bantuan pengobatan orang miskin, Program bantuan beras miskin (Raskin) dari BULOG, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengentasan Perkotaan (P2P), Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PPMP), Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi BBM dan program-program lainnya. Dalam pendidikan nonformal pemberdayaan masyarakat terutama penganggur dilakukan melalui berbagai program diantaranya pendidikan kecakapan hidup (PKH).

Pelaksanaan PKH merupakan suatu tindakan yang diharapkan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. PKH sebagai salah satu program PLS dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan dengan unsur-unsurnya: tujuan, materi, metode, media, monitoring dan evaluasi, dan dampak.

Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa: (1) secara umum PKH diselenggarakan sekali setahun oleh masing-masing penyelenggara dengan jumlah peserta rata-rata 20 -30 orang; (2) lama pelaksanaan PKH rata-rata 25 jam; (4) jenis PKH tiap tahun berbeda disesuaikan dengan trend perkembangan;

(5) metode pelaksanaan lebih ditekankan pada aspek penguasaan keterampilan dengan metode ceramah/kuliah, diskusi, dan praktik; (6) komponen yang terlibat dalam proses adalah: peserta/warga belajar, instruktur, sarana-prasarana, kurikulum, proses belajar dan evaluasi, dan unsur pengelola; (7) model PKH yang diselenggarakan masih bersifat konvensional dan belum memiliki model baku (standar); dan (8) rata-rata persentase lulusan yang dapat mandiri lk. 20%. Ini artinya bahwa persentase lulusan yang tidak dapat mandiri ada lk. 80%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PKH belum bermanfaat maksimal bagi lulusan dalam rangka mengatasi pengangguran.

Di sisi lain, pemerintah daerah mengalami kendala dalam mengatasi masalah pengangguran, dengan beberapa permasalahan diantaranya:

- (1) terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas;
- (2) lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial;
- (3) timbulnya hambatan distribusi dan perdagangan antar kecamatan;
- (4) tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan;
- (5) rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan;
- (6) rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan;
- (7) rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- (8) meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain;
- (9) meningkatnya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (10) lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat;
- (11) lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan (Hasil W.W. dengan R.P.1).

Sektor tenaga kerja yang menganggur di pedesaan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak karena tenaga kerja yang terampil dapat mendatangkan keuntungan ganda terutama peningkatan pendapatan warga masyarakat pedesaan, karena beban hidup masyarakat pedesaan semakin berat terutama sejak krisis moneter 1997 sampai sekarang sehingga angka kemiskinan terus bertambah. Meskipun pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 4% namun belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat pedesaan karena mahalnnya

biaya produksi dan tidak diikuti oleh kenaikan harga hasil produksinya. Pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya masih belum mampu menyentuh sesuai kebutuhan masyarakat. Bahkan banyak areal atau lahan kosong sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan realita bahwa terbatasnya lapangan kerja maka upaya untuk mengatasi masalah pengangguran, di samping optimalisasi fungsi pendidikan yang lebih menekankan pada penguasaan keterampilan tertentu juga perlu dalam suatu program pendidikan dimana programnya diintegrasikan dengan konsep pemanfaatan potensi lokal yang ada berdasarkan kebutuhan warga belajar. Pelaksanaan pendidikan ataupun pelatihan yang selama ini dilakukan, semestinya terfokus pada penerapan hasil-hasil pendidikan dan pelatihan, namun kenyataannya lain. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa hasil pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan penyelenggara PLS, secara umum belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh program-program yang diikuti merupakan program yang didanai melalui proyek pemerintah dan minat warga belajar hanya sebatas waktu yang telah ditetapkan pengelola saja. Hal lain sebagai penyebab utama adalah karena keikutsertaannya tidak berdasarkan kebutuhan dan tidak mempertimbangkan potensi yang ada. Oleh karenanya, suatu program pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada warga belajar sebaiknya dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan memperhatikan potensi yang tersedia di lingkungan warga belajar tersebut sehingga warga belajar dapat lebih leluasa dalam mengembangkan dirinya sesuai potensi yang ada.

Dengan kondisi para pengangguran yang tidak memiliki bekal pengetahuan teknis yang cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam mengelola atau mengolah potensi lokal yang ada. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus berkepanjangan karena akan berakibat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat dan kerusakan sumber daya lokal. Kerusakan sumber daya lokal tersebut bisa terjadi karena faktor ketidak tahuan, dan faktor pola pikir tradisional masyarakat pedesaan. Sesungguhnya keberadaan masyarakat pedesaan juga mampu mendorong pembangunan, hanya saja terasa masih kurang mendapat perhatian sehingga menjadi terbelakang dan miskin.

Jika kita lihat dari ketersediaan potensi di pedesaan dalam rangka mengatasi pengangguran, maka program yang tepat dan praktis dan hasilnya dapat diterapkan dan dinikmati dalam kehidupan sehari-hari adalah program pendidikan kecakapan hidup (PKH) berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal yang ada.

Tujuan pengembangan program pendidikan luar sekolah dalam bentuk PKH tidak hanya diarahkan untuk perubahan sikap dan perilaku, akan tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan proses modernisasi di era globalisasi. Untuk itu, pengembangan program PKH seyogyanya diarahkan pada dua hal, yakni: (a) pendidikan bekal kerja, yang membekali pengetahuan dan keterampilan guna memasuki lapangan kerja; (b) pendidikan kecakapan hidup (*lifes skills*) untuk dapat mentransformasikan nilai dan perilaku yang dinamis dan mandiri serta terhindar dari sikap-sikap ketergantungan. Salah satu bentuk satuan program pendidikan yang mencoba mewujudkan kedua tujuan pembelajaran di atas,

adalah program pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja (Vocational) yang berbasis kebutuhan dan potensi lokal yang tersedia.

Dari uraian tersebut di atas, berikut akan diidentifikasi berbagai komponen strategis yang diprediksi memiliki hubungan fungsional dengan perubahan sikap dan perilaku para penganggur sebagai warga belajar yang meliputi:

Komponen pertama adalah kebutuhan warga belajar. Kebutuhan warga belajar merupakan komponen pertama dalam proses pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Kebutuhan warga belajar akan program pendidikan kecakapan hidup merupakan bekal untuk mengembangkan diri dan bekerja untuk mencari nafkah. Kebutuhan menjadi kajian yang sangat penting karena warga belajar adalah anggota masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar membelajarkan pada program pendidikan kecakapan hidup. Miller (Dalam Soedomo, 1989: 62-63) mengemukakan enam karakteristik yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam belajar yaitu: (1) warga belajar haruslah mempunyai dorongan untuk mengubah perilakunya, (2) mereka menyadari perilaku yang sedang dialaminya; (3) mereka harus mempunyai gambaran yang jelas tentang perilaku yang diinginkan; (4) mereka harus mempunyai kesempatan menerapkan perilaku yang dipersyaratkan; (5) mereka harus memperoleh kemampuan mengoreksi perilakunya; dan (6) mereka harus mempunyai sarana yang memadai.

Ditinjau dari segi prinsip, Broekfield (1984: 26) mengemukakan bahwa pendidikan orang dewasa harus menggunakan prinsip-prinsip: (1) belajar harus berpusat pada masalah; (2) belajar harus berpusat pada pengalaman nyata; dan (3) warga belajar harus mempunyai balikan tentang proses pencapaian tujuan. Oleh

karenanya kebutuhan warga belajar bila sesuai dengan isi/materi dari suatu program pendidikan maka diprediksi akan berdampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku.

Komponen *kedua* adalah *sarana-prasarana*. Salah satu aspek yang seyogyanya mendapat perhatian utama oleh pengelola program pendidikan kecakapan hidup adalah sarana-prasarana. Sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran perlu dilengkapi berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada. Tujuannya supaya lembaga pelaksana PKH menjadi tempat yang menyenangkan, mudah serta sederhana dan tujuan tercapai. Dengan demikian, ketersediaan sarana prasarana akan berdampak kepada kenyamanan dan keamanan, serta meningkatkan efektivitas hasil pembelajaran.

Sarana-prasarana pendidikan pada lembaga penyelenggara PKH menurut Depdiknas (2003) dapat dikategorikan: (1) gedung yang meliputi: ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dan toilet; (2) bahan belajar meliputi: buku-buku pelajaran, modul-modul, dan bahan belajar lain sesuai jenis PKH yang diselenggarakan; (3) media pembelajaran, seperti OHP, LCD, video program, dan alat peraga lainnya, (4) sarana-prasarana lain yang dapat meningkatkan proses pembelajaran.

Komponen *ketiga* adalah *kurikulum dan program pendidikan*. Dalam program PKH, kurikulum merupakan *instrumental input* yang selalu menjadi patokan dan dijabarkan dalam proses pembelajaran, sehingga mampu merubah sikap warga belajar. Kajian tentang pengertian dan konsep kurikulum berkembang terus menerus sesuai perkembangan kurikulum itu sendiri. Berbagai ahli pendidikan mengemukakan pendapatnya mengenai kurikulum. Seperti yang dikemukakan

oleh Hamalik (2006: 91) bahwa: Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.

Taba (1962) memberikan pengertian kurikulum sebagai "*plan for learning*". Engkoswara (2001: 35) menyebutkan bahwa: Kurikulum adalah seperangkat rencana yang disisipkan untuk membekali manusia khususnya peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat berupa mata pelajaran, bidang studi, berbagai kegiatan dan segala sesuatu yang memungkinkan membekali manusia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kurikulum sebaiknya disesuaikan dengan struktur kualitas kemandirian manusia.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) menegaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kurikulum juga berarti cara atau pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya pada pasal 36, dikemukakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan berbagai aspek, antara lain tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Sementara menurut Abdulhak (2000: 36-37) program pendidikan pada

hakikatnya merupakan jawaban terhadap masalah belajar yang dihadapi oleh perorangan atau sekelompok orang (calon peserta belajar). Menurutnya, fokus program pembelajaran ingin menjawab empat pertanyaan dasar yaitu: Tujuan apa yang akan dicapai? Materi apa yang akan disampaikan? Strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan? dan Bagaimana caranya menetapkan kriteria keberhasilan peserta?

Komponen ke empat adalah proses pembelajaran. Komponen terpenting dari penyelenggaraan sistem pembelajaran pada program PKH adalah proses pembelajaran. Disinilah terjadi interaksi antara warga belajar dan sumber belajar dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada. Secara ideal proses belajar dan membelajarkan pada program PKH dilaksanakan dengan belajar teori dan praktik. Praktik dapat dilaksanakan, baik di kelas/laboratorium/magang di dunia usaha/industry maupun di tempat kerja/usaha berdasarkan PKH yang dilaksanakan. Pelaksanaan praktik kerja sangat penting, sebab akan menjamin kesiapan warga belajarnya memasuki dunia kerja. Setelah dilaksanakan pembelajaran teori dan praktik diadakan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses belajar dan membelajarkan. Pada bagian akhir dan proses belajar membelajarkan, dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengikuti proses belajar membelajarkan baik teori maupun praktik.

Komponen kelima adalah *partisipasi warga belajar*. Komponen-komponen pengelolaan PKH meliputi: perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran (pelaksanaan), monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran. Dalam sebuah PKH fungsi-fungsi tersebut memiliki atribut-atribut tersendiri, meskipun dalam

implementasinya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan satuan-satuan pendidikan luar sekolah lainnya.

Upaya menciptakan program pembelajaran, baik itu mencakup pengorganisasian pembelajaran, suasana belajar, dan proses pembelajaran yang lebih baik dan efektif, Knowless (1980: 122-123) menyarankan adanya pelibatan warga belajar dalam perencanaan bersama (*mutual planning*), atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sejalan dengan pemikiran Knowless, Davis (1972: 77) dan Kindervatter (1979: 214) lebih jelas menyarankan: (a) partisipasi warga belajar (peserta didik) dalam pengelolaan pembelajaran terutama dalam rangka meningkatkan dan keterlibatan emosi dan mental, (b) motivasi warga belajar untuk menyumbang (kontribusi), (c) penerimaan dan pengalihan sebagian tanggung-jawab kepada warga belajar. Implementasi prinsip tersebut bertujuan, agar kegiatan pendidikan luar sekolah menyatu antara pengelola, tutor, sasaran (warga belajar) serta masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan pula laporan dari *The Action Cultural Popular (ACPO)* bahwa masalah pokok dari keterbelakangan bukanlah kurangnya bahan baku, melainkan ketidakmampuan penduduk desa untuk mengatasi keterbelakangan mereka dan menghilangkan rintangan-rintangan budaya seperti sikap-sikap tradisional, pasrah pada nasib dan ketergantungan, baik secara individual maupun kolektif. Hal ini harus dibuka oleh kondisi-kondisi eksternal yang melingkupinya (Ahmed dan Coombs, 1977: 4).

Dari uraian di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

Pertama, Menemukenali kondisi objektif potensi lokal sebagai dasar

pelaksanaan PKH bagi pengangguran.

Kedua, Penelitian ini berupaya menemukenali masalah yang berkenaan dengan program PKH yang pernah dilaksanakan oleh para penyelenggara antara lain meliputi lembaga penyelenggara, program yang dilaksanakan, sumber daya (Sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan finansial), piranti lunak (kebijakan, kurikulum, prosedur) serta jejaring kemitraan. Hal ini dilakukan melalui analisis *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats* atau yang dikenal dengan analisis SWOT.

Ketiga, penelitian ini berupaya mengungkap dan merumuskan rancangan model konseptual pendidikan kecakapan hidup bagi penganggur dengan langkah-langkah, antara lain: Sistem, proses, pendekatan, materi dan metode pendidikan kecakapan hidup.

Keempat, penelitian ini berupaya menguji validitas model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran, sebelum diimplementasikan terhadap warga belajar sebagai kelompok belajar usaha (KBU). Validasi model dilakukan untuk melihat kelayakan model konseptual pendidikan kecakapan hidup bagi para penganggur.

Kelima, penelitian ini akan mengaplikasikan model pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran dengan pelibatan berbagai pihak sebagai sumber belajar (instruktur/fasilitator).

Keenam, model pendidikan kecakapan hidup yang terbentuk dilaksanakan dengan mengacu pada indikator-indikator keberhasilan, baik dari aspek penguasaan materi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) oleh warga belajar maupun aspek dampak dan dampak hasil pembelajaran (*out-put* dan *out-come*).

Permasalahan pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas, akan dijawab melalui studi eksplorasi dan studi deskriptif faktual dengan pendekatan kualitatif seperti diungkapkan Lincoln dan Guba (1985) disebut *inquiry naturalistic*. Secara umum Mc. Millan dan Schumacher (2001) menyatakan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa realitas merupakan sesuatu yang bersifat ganda, saling berinteraksi serta di dalamnya terjadi saling bertukarnya pengalaman-pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.

Hasil penelitian deskriptif selanjutnya menjawab permasalahan keempat, yaitu memvalidasi model konseptual pendidikan kecakapan hidup sebagai model sementara oleh para ahli dan praktisi. Model konseptual yang telah dirumuskan dan direvisi, akan dilakukan uji coba terbatas untuk mengetahui kelayakan model tersebut dengan menggunakan metode *quasi-experiment*. Langkah berikut mengimplementasikan model pendidikan kecakapan hidup sampai tahap diseminasi model. Salah satu bentuk diseminasi model yang akan dilakukan adalah diskusi dengan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam program pendidikan kecakapan hidup. Dengan demikian, secara metodologis, prosedur penelitian ini menggunakan rancangan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Developmen = R & D*).

Berangkat dari fokus masalah penelitian yang diuraikan di atas, maka masalah secara umum dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana model pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Merangin?

Dari permasalahan umum tersebut di atas, masalah selanjutnya difokuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai sub-masalah:

1. Bagaimana kondisi faktual pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi pengangguran?
2. Bagaimana model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran?
3. Bagaimana implementasi model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran?
4. Bagaimana efektivitas model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menggambarkan upaya pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup pada warga masyarakat yang menganggur.
2. Mengembangkan model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran.
3. Mendeskripsikan implementasi model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran.
4. Memperoleh data tentang efektivitas model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal untuk mengatasi pengangguran.

D. Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini dan perlu dijelaskan secara operasional sehingga tidak menimbulkan kesalahtafsiran dalam

memaknai dan/atau memahami istilah. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Model diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, model dimaksudkan sebagai abstraksi mengenai aspek-aspek masalah yang terpilih yang disusun sebagai acuan/pola kegiatan dan prosedur yang relatif tetap untuk tujuan-tujuan tertentu.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (USPN, 2003). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar warga belajar kelompok belajar usaha (KBU) secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
3. Kecakapan hidup, kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Kecakapan hidup dalam hal ini difokuskan pada kecakapan *Vocational (Vocational skills)*.
4. Program pendidikan kecakapan hidup (PKH) merupakan program yang diperlukan warga belajar agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional.
5. Pelatihan (*training*) adalah pembelajaran individual dan/atau kelompok yang

bersifat mendesak karena adanya kebutuhan akan pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu (Nadler, 1982: 6). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelatihan adalah proses kegiatan pembelajaran bagi peserta didik (warga belajar) untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta aspirasi untuk mencapai standar kehidupan yang diharapkan. Materi pelatihan yang perlu dikuasai atau dimiliki peserta pelatihan berupa pengetahuan dan keterampilan.

6. Pembelajaran adalah upaya baik disengaja atau tidak oleh seseorang yang mengacu pada bagaimana melakukan dan mengembangkan sesuatu sehingga produk dari pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
7. Pemberdayaan, dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan anggota kelompok belajar usaha terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hidup bagi diri dan/atau rumah tangganya. Pemberdayaan masyarakat (rumah tangga penganggur) ditandai munculnya kesadaran, kemauan, kemampuan, dan sikap positif serta aspirasi dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui program kecakapan hidup untuk memecahkan masalah pengangguran.
8. Potensi lokal adalah daya atau kekuatan yang tersedia dan/atau dimiliki oleh masing-masing warga belajar KBU untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Pengangguran adalah warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan permanen dalam bidang tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan. Para penganggur ini sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya, termasuk ke dalam hal ini adalah

pengangguran struktural, musiman, siklikal, sukarela dan dukalara, pengangguran terbuka (*open unemployment*), setengah pengangguran (*under unemployment*), dan setengah pengangguran yang parah (*severe underemployment*) dan penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja.

10. Kelompok Belajar Usaha (KBU) adalah kelompok orang yang sepakat untuk saling berinteraksi dengan struktur yang formal untuk saling membelajarkan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya agar masing-masing anggotanya memiliki kecakapan hidup untuk meneruskan kehidupan dimasa datang.
11. Efektivitas adalah “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai” (Hidayat dan Syamsulbahri, 2001). Semakin besar prosentase target yang tercapai semakin tinggi tingkat keefektifannya.
12. PKBM adalah singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program-program pendidikan seperti PAUD, pendidikan kesetaraan, keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, kursus, pendidikan kecakapan hidup, dan lain sebagainya.

E. Sistematikan Penulisan

Disertasi ini terdiri atas lima bab. Bab I membahas latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penjelasan istilah serta sistematika penulisan. Pada Bab I ini, diidentifikasi penyebab seseorang menganggur,

khususnya dikalangan masyarakat (usia produktif), lalu diformulasikan model pendidikan kecakapan hidup yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah pengangguran. Bab II mengemukakan hasil-hasil survey kepustakaan yang terkait dengan konsep kebutuhan, konsep PLS dan PKH yang dilaksanakan untuk mengatasi pengangguran. Bab III membahas tentang metode penelitian berikut langkah-langkahnya seperti pendekatan dan metode, prosedur, lokasi dan subjek penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, dan teknik analisis dan penafsiran data. Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab ini juga dipaparkan tentang deskripsi hasil studi eksplorasi yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian deskriptif, rancangan model konseptual, validasi dan revisi model konseptual, ujicoba model, efektifitas model dan model akhir, skenario pelaksanaan, dan pembahasan. Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang terdiri atas beberapa kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan terdiri atas gambaran kondisi faktual PKH yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi pengangguran, model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal, implementasi model konseptual pendidikan kecakapan hidup berbasis kebutuhan dan potensi lokal, model pendidikan kecakapan hidup yang direkomendasikan dalam mengatasi pengangguran. Pada implikasi terdiri atas implikasi teoritis dan implikasi praktis. Sedangkan pada rekomendasi terdiri pula atas rekomendasi untuk penerapan model dan rekomendasi bagi peneliti lanjutan.